

WKRI Sultra Gelar Konferda V, Pemprov Dorong Perempuan Katolik Perkuat Peran Sosial

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan peran organisasi perempuan Katolik dalam pembangunan sosial di daerah. Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra, Iwan Susanto, mewakili Gubernur Sultra, saat menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) V Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) DPD Sultra, Sabtu, 10 Mei 2025, di Hotel Zenith Kendari.

Kegiatan lima tahunan yang digelar WKRI Sultra ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi internal dan refleksi perjalanan organisasi yang telah berusia seabad lebih. Tema yang diangkat, “Peran Wanita Katolik RI pada Usia Seabad dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama dan Kesadaran Ekologis,” dinilai sejalan dengan nilai-nilai pelayanan dan penguatan peran perempuan di ruang publik.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Konferda ini sebagai forum strategis memperkuat eksistensi organisasi masyarakat sipil, khususnya WKRI, di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi,” kata Iwan saat membacakan sambutan Gubernur.

Menurutnya, setidaknya ada tiga pesan moral dari tema Konferda kali ini. “Pertama, refleksi dan evaluasi perjalanan organisasi selama lebih dari seabad. Kedua, pengembangan program yang berdampak bagi masyarakat. Ketiga, penguatan kolaborasi lintas organisasi agar program-program yang dijalankan lebih efektif,” ujar Iwan.

Ia juga menekankan agar WKRI terus menjadi pelopor dalam membumikan nilai-nilai cinta kasih di tengah kehidupan sosial, serta aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Konferda V WKRI Sultra turut dihadiri Ketua Presidium DPP WKRI, Lusiana Willar,

Penasehat Rohani WKRI DPD Sultra Pastor Leonardo Kelvin Tandiayu, Ketua Presidium WKRI DPD Sultra Rita Pirade, Ketua Barisan Ansor Sultra, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra atau yang mewakili, serta para sesepuh dan anggota WKRI dari berbagai wilayah.

Dalam sambutannya saat membuka acara secara resmi, Lusía Willar menegaskan pentingnya Konferda sebagai forum evaluasi dan penetapan arah gerak organisasi ke depan. “Ini bukan hanya seremoni lima tahunan, tapi momentum memperkuat semangat pelayanan yang menjadi roh dari WKRI,” kata Lusía.

Ia juga menyoroti peran WKRI dalam menjaga keberagaman, menangkal radikalisme, serta membangun solidaritas sosial berbasis cinta kasih dan nilai-nilai demokrasi. “WKRI harus menjadi pelita yang membawa harapan, memperkuat jejaring lintas agama dan budaya, serta merangkul generasi muda, terutama remaja putri, agar aktif dalam organisasi,” ujarnya.

Saat ini, WKRI tercatat memiliki 37 DPD, 783 DPC, dan lebih dari 105 ribu anggota di seluruh Indonesia. Dengan jaringan luas tersebut, WKRI diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua Presidium WKRI DPD Sultra, Rita Pirade, menyampaikan bahwa Konferda kali ini akan melahirkan kepengurusan baru serta merumuskan berbagai kebijakan yang berdampak nyata. “Kita berharap hasil Konferda bisa menjadi langkah maju bagi WKRI Sultra dalam menjalankan misi sosial dan kemasyarakatan,” kata Rita.

Ia juga mengajak seluruh anggota WKRI untuk terus menjaga semangat pelayanan, mengembangkan program-program pemberdayaan berbasis komunitas, serta memperkuat kehadiran organisasi di tengah masyarakat.

WKRI sebagai organisasi perempuan Katolik non-partisan, telah berkontribusi selama lebih dari satu abad dalam bidang sosial, pendidikan, advokasi perempuan, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Melalui Konferda ini, organisasi tersebut ingin memastikan bahwa warisan nilai pelayanan tetap hidup dan relevan dengan tantangan zaman.

Kegiatan Konferda V WKRI DPD Sultra berlangsung dalam suasana akrab, khidmat, dan penuh semangat persaudaraan. Diharapkan, hasil dari forum ini tidak hanya memperkuat internal organisasi, tetapi juga berdampak luas bagi

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang lebih inklusif.